

berat, Aku akan memberi keleaan kepadamu. Pukullah kuku yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” (Mat. 11:28-29).

GEREJA DAN NEGARA: Perbandingan Pemikiran Mengenai Hubungan Gereja dan Negara dari Para Reformator¹ dengan Penilaian Etis-Teologis Paulus dalam Roma 13:1-7

Chandra Gunawan

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk membandingkan pemikiran para reformator (Luther, Zwingli, Calvin dan Aliran Anabaptis) yang memengaruhi cara pandang gereja-gereja Protestan masa kini dalam merandang hubungan gereja dan negara dengan pemikiran Paulus dalam Roma 13:1-7. Melalui perbandingan ini, pembaca akan melihat bahwa pergumulan Paulus dan para reformator saat membicarakan hubungan gereja dan negara adalah berbeda. Dengan menyadari perbedaan konteks antara Paulus dan para reformator, pembaca diharapkan dapat memikirkan ulang mengenai bagaimana gereja sebagai sebuah lembaga non-politik dan orang Kristen sebagai individu dari masyarakat seharusnya bersikap terhadap negara dalam konteks Indonesia.

PENDAHULUAN

Salah satu pergumulan dari para reformator adalah menentukan pola hubungan yang tepat antara gereja dan negara. Para reformator baik Luther, Zwingli, Calvin maupun kelompok Anabaptis menyoroti dan membicarakan tema ini secara khusus.² Hal ini menunjukkan hubungan antara gereja dan negara adalah isu utama dalam gerakan reformasi.³

¹ Istilah ‘para reformator’ yang digunakan penulis menunjuk pada tokoh Martin Luther, Huldreich Zwingli, John Calvin, dan kelompok Anabaptis (yang disebut juga kelompok reformasi radikal). Alister McGrath menjelaskan bahwa secara umum istilah “Reformation” digunakan untuk menunjuk 4 gerakan yakni Lutheranisme, Calvinisme (Reformed), Anabaptisme (Radical Reformation) dan Reformasi Katolik (Counter Reformation); Namun, istilah yang sama juga digunakan dalam konteks protestan yang menuju pada tiga gerakan reformasi kecuali reformasi Katolik. *Reformation Thought: An Introduction*, 2nd.ed. (Oxford: Blackwell, 1993), 5-6.

² Pemikiran Luther mengenai negara salah satunya nampak dalam risalah yang ditulis Luther pada tahun 1520 *To the Christian Nobility of German Nation*. Pemikiran Zwingli mengenai negara salah satunya nampak dalam perdebatan pertama Zwingli dengan dewan kota, tulisan Zwingli *sixty seven Schlussreden* menjadi materi utama dalam perdebatan tersebut; dalam tulisan terlihat juga gagasan Zwingli mengenai negara. Pemikiran Calvin mengenai negara salah satunya terlihat dalam bagian akhir dari buku

Pergumulan mengenai bagaimana orang-orang Kristen harus bersikap terhadap negara atau pemerintah ternyata tetap menjadi pergumulan gereja sampai hari ini.⁴ Pertanyaan “bagaimanakah sehatusnya sikap orang Kristen terhadap pemerintah” menjadi sulit untuk dijawab sebab konflik pemerintah yang dihadapi oleh orang-orang Kristen tidaklah sama. Sebagian orang Kristen yang tinggal di negara yang mayoritas penduduknya pemerintahannya Kristen, tentu tidak terlalu sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban “ketaatan.” Namun, untuk orang-orang Kristen yang tinggal di negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan Kristen, apakah tinggal di negara-negara yang pemerintahnya menekan kekristenan, mereka tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban “ketaatan.”

Jika kita membaca teks-teks Alkitab yang berbicara mengenai pemerintah salah satunya adalah ajatan Paulus dalam Roma 13:1-7, kita berhadapan dengan gagasan yang cukup sulit untuk dipahami. Seperti halnya dengan tidak mudah hidup “orang-orang percaya” yang tinggal di negara yang baik pemerintahnya maupun mayoritas penduduknya bukan Kristen, Paulus dan jemaat-jemaat Kristen juga mengalami hal yang sama, namun mengapa Paulus menegaskan bahwa umat Tuhan harus tunduk pada pemerintah.⁵ Bagaimana jika pemerintah melakukan kejahanatan, apakah orang-orang Kristen tetap harus tunduk kepada pemerintah yang demikian? Jika memang kita harus tunduk dengan institusi yang seperti itu, bagaimana dengan sikap Petrus dan Yohanes yang berkata bahwa “mereka harus lebih tunduk kepada Allah dari pada kepada manusia,” (I

institution yang dituliskan. Sedangkan pemikiran kaum Anabaptis terhadap negara tampak dalam Pengakuan Iman Schleitheim (1527). Lih. McGrath, *Reformation Thought*, 203, 205-206, 213; Dolf Brötz, “Politics and Social Life,” in *The Calvin Handbook*, Herman J. Selderhuis (Grand Rapids: Eerdmans, 2008), 440-446.

³ Bdk. McGrath, *Reformation Thought*, 15-20. Reformasi tidak terjadi sekadar karena faktor pergumulan teologis, namun ada faktor-faktor lain—salah satunya adalah kekacauan dalam bidang sosial dan politik dari negara-negara Eropa waktu itu—yang menjadi pergumulan masyarakat abad pertengahan yang turut memengaruhi terjadinya reformasi.

⁴ Lih. *Pola Hidup Kristen: Penerapan Praktis* (Malang: Gandum Mas, n.d.), 919-957

⁵ Bdk. N. Elliott, *Liberating Paul: The Justice of God and Politics of Paul the Apostle* (Maryknoll: Orbis, 1994; Sheffield: Sheffield Academic, 1995), 217-218.

1:19), bukankah perkataan tersebut menyiratkan adanya ketidaktaatan kepada institusi lokal (pemerintah) mereka.

Oleh karena pemikiran orang-orang Kristen masa kini⁶ terhadap pemerintah dipengaruhi juga oleh pemikiran dari para reformator, maka kita perlu mempelajari dan menelusuri pemikiran mereka supaya kita memahami bagaimana konteks awal dari pergumulan mereka sehingga kita dapat mempertimbangkan sejauh mana kita dapat mengakomodir sikap dan pandangan mereka terhadap negara dalam pergumulan kita sekarang. Pembahasan ajaran Paulus mengenai pemerintah/negara dalam Roma 13:1-7 juga penting untuk dibahas sebab ajaran tersebut memengaruhi baik para reformator maupun orang-orang Kristen di zaman sekarang dalam melihat hubungan gereja dan negara. Selain itu, dibandingkan dengan teks Alkitab lainnya, Roma 13:1-7 merupakan bagian tulisan Paulus yang paling jelas berbicara mengenai pemerintah/negara.⁷ Dengan mengerti konteks pemikiran Paulus dalam Roma 13:1-7, kita akan dibantu untuk tidak memahami nasihat Paulus berdasarkan “kaca mata” para reformator, namun berdasarkan “kaca mata” Paulus sendiri.

PEMIKIRAN PARA REFORMATOR MENGENAI HUBUNGAN GEREJA DAN NEGARA

Untuk dapat memahami konteks pandangan para reformator mengenai hubungan gereja dan negara, kita harus sedikit membicarakan pandangan gereja Roma Katolik mengenai hubungan gereja dan negara yang dipengaruhi oleh pergumulan dan teologi era abad pertengahan.⁸ Pergulatan atau pergumulan gereja abad pertengahan mengenai hubungan gereja dan negara sudah tejadi

⁶ Sebagai contoh hubungan antara gereja dan negara di Amerika yang cenderung memisahkan kedua lembaga tersebut, jelas terpengaruh pemikiran kaum reformasi. Bdk. Mark Hatfield, “Politik dan Kekristenan,” in *Pola Hidup Kristen: Penerapan Praktis*, 920-921.

⁷ Bdk. Robert H. Stein, “The Argument of Romans 13:1-7” *Nouum Testamentum XXXI*, 4 (1989): 325. Teks lain yang juga berbicara mengenai negara adalah 1 Timotius 2:1-4 dan Titus 3:1. Bdk. Herman Ridderbos, *Paulus: Pemikiran Utama Teologinya*, terj. (Jakarta: Momentum, 2008), 336.

⁸ McGrath, *Reformation Thought*, 205; Untuk melihat lebih lanjut hal ini lih. Earle E. Cairns, *Christianity through the Centuries: A History of the Christian Church*, 2nd. & rev. ed. (Grand Rapids: Zondervan, 1981), 199-217.

sejak abad ke-8 M.⁹ Sistem feudalisme dan perpecahan dari *Carolingian Empire* membuat gereja/kepausan semakin kuat menguasai pemerintahan; pada akhirnya, Paus menyatakan dirinya sebagai *the temporal and spiritual ruler*. Pengaruh dari kekuasaan gereja terhadap negara mencapai puncaknya pada tahun 1054-1305M tetapi kemudian mengalami penurunan yang tajam hingga memasuki abad menjelang reformasi.¹⁰ Ajaran mengenai hubungan gereja dengan negara di era abad pertengahan dikenal dengan sebutan *the doctrine of two estates*. Dua *estates* yang dibicarakan menunjuk pada *temporal estate* dan *spiritual estate*. Pemerintah adalah *temporal estate* sedangkan gereja adalah *spiritual estate*, gereja sebagai *spiritual estate* dapat intervensi kedalam pemerintah yang merupakan *temporal estate*, namun hal tersebut tidak berlaku sebaliknya.¹¹

Pandangan reformator pertama yang akan kita diskusikan adalah Martin Luther. Pemikiran Luther mengenai hubungan gereja dan negara adalah sebagai berikut: pertama, pemikiran Luther mengenai hubungan gereja dan negara berkembang dalam konteks pergumulan dia dengan warisan pemikiran abad pertengahan yang “mendualiskan” institusi gereja dan negara. Melalui gagasan *priesthood of believers*, Luther menegaskan bahwa semua orang percaya termasuk orang-orang yang duduk dalam pemerintah adalah bagian dari *spiritual estate*; perbedaan di antara kedua bagian tersebut bukan terletak pada statusnya namun pada fungsi/tugasnya.¹² Kedua, Luther membedakan antara gereja dan negara melalui gagasan *two kingdoms*. Gereja disebut Luther sebagai *God's spiritual government* sedangkan negara adalah *God's worldly government*; cara kerja dari pemerintahan yang pertama adalah melalui Firman Allah dan pimpinan Roh Kudus, sedangkan cara kerja dari pemerintah yang kedua melalui *sword and sword*.

⁹ Lih. Cairns, *Christianity through the Century*, 191-197.

¹⁰ Lih. Cairns, *Christianity through the Century*, 195.

¹¹ Cairns menjelaskan ada dua faktor yang memengaruhi hal ini yaitu (i) hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga gereja karena para pejabat gereja memiliki moralitas yang buruk dan rendah; (ii) kemunculan “nation-state.” *Christianity through the Centuries*, 209-217; 245-248; 265-268.

¹² McGrath, *Reformation Thought*, 205.

¹³ McGrath, *Reformation Thought*, 205-206.

civil law.¹⁴ Ketiga, dalam konteks *Christian society*, tugas dari negara adalah mengontrol kejahatan;¹⁵ pemikiran Luther dipengaruhi oleh Agustinus yang memandang bahwa dalam gereja dan dunia, orang-orang baik (benar) dan jahat bercampur; orang-orang baik (benar) dikendalikan oleh Roh Kudus, sedangkan orang-orang jahat haruslah dikendalikan oleh pemerintah melalui hukum dan penghukuman.¹⁶ Keempat, oleh karena gereja ada dalam dunia ini dan oleh karena yang bertugas/berfungsi mengatur dunia ini adalah pemerintah, maka gereja haruslah tunduk kepada pemerintah.¹⁷ Luther tidak setuju dengan campuran tugas pemerintah dalam gereja terkait dengan ajaran Firman Tuhan, namun dalam kaitannya dengan pengaturan masyarakat, gereja haruslah tunduk pada pemerintah; Luther bahkan meyakini bahwa orang-orang Kristen tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang berlaku sewenang-wenang; gagasan Luther ini menimbulkan kritik yang tajam sebab Luther dianggap mendorong orang-orang Kristen bersikap toleran terhadap kejahanatan atau ketidakadilan yang ada dalam struktur masyarakat ataupun pemerintahan.¹⁸

Pandangan reformator kedua yang akan kita bicarakan adalah Huldreich Zwingli.¹⁹ Beberapa pandangan Zwingli mengenai hubungan gereja dan negara adalah sebagai berikut: Pertama, gereja dan negara terkait erat, kedua lembaga

¹⁴ McGrath, *Reformation Thought*, 207; Euan Cameron, *The European Reformation* (Oxford: Clarendon, 1991), 152.

¹⁵ Luther menegaskan hal ini sebab ia menyadari bahwa tidak semua orang adalah orang Kristen dan dalam komunitas Kristen sendiri tidak semua orang Kristen adalah orang-orang baru dan bertumbuh, itulah sebabnya “hukum” tetap diperlukan untuk mengatur masyarakat. Lih. Oswald Martin Luther, “Martin Luther (1483-1546),” in *The Reformation Theologians: An Introduction Theology in the Early Modern Period*, ed. Carter Lindberg (Oxford: Blackwell, 2002), 62.

¹⁶ McGrath, *Reformation thought*, 208.

¹⁷ Oswald menjelaskan bahwa bagi Luther, tujuan dari orang-orang Kristen memenuhi hukum atau aturan yang ditentukan oleh pemerintah bukan karena secara esensial mereka membutuhkan hal tersebut namun untuk kepentingan orang lain (masyarakat). “Martin Luther (1483-1546),” 63.

¹⁸ McGrath, *Reformation Thought*, 209.

¹⁹ Untuk mempelajari reformasi yang digerakkan oleh Zwingli lih. Cairns, *Christianity through the Centuries*, 301-305.

ini sama-sama di bawah otoritas Tuhan dan tidak terpisahkan;²⁰ Zwingli percaya bahwa baik gereja maupun pemerintah berperan sangat penting dalam terjadinya reformasi.²¹ Kedua, pemerintahan muncul karena akibat dosa, jika manusia tidak berdosa, kita tidak membutuhkan pemerintah.²² Ketiga, negara berhak untuk menggunakan kekuasaannya dalam menghukum anggota komunitas/masyarakat yang bersalah sebab tidak semua anggota komunitas/masyarakat adalah orang percaya.²³ Keempat, orang-orang Kristen boleh (bahkan didorong) untuk menjadi pejabat publik, Zwingli percaya bahwa orang-orang yang sebaiknya menjadi pejabat adalah orang-orang yang takut akan Tuhan; Zwingli memandang jika negara/pemerintah tidak dikuasai oleh orang yang takut akan Tuhan, maka orang jahatlah yang akan menguasai negara/pemerintah.²⁴ Kelima, Zwingli memisahkan antara “aturan moral” untuk pribadi dan publik, sebagai contoh, perintah Tuhan untuk tidak membala kejahatan dengan kejahatan berlaku untuk moralitas pribadi namun bukan untuk pemerintah.²⁵

²⁰ Cameron, *The European Reformation*, 153; Zwingli percaya bahwa hubungan gereja dan negara itu seperti tubuh dan jiwa, di mana keduanya saling membutuhkan dan tidak terpisahkan. Lih. Gregory J. Miller, “Huldrych Zwingli (1484-1531),” *The Reformation* *Theologians*, 164.

²¹ McGrath, *Reformation Thought*, 211-214; Miller, “Huldrych Zwingli (1484-1531),” 164.

²² McGrath, *Reformation Thought*, 211-214. Menurut Miller, Zwingli membedakan antara kebenaran Allah dan kebenaran manusia, kebenaran Allah menunjuk pada kebenaran firman Tuhan sedangkan kebenaran manusia menunjuk pada aturan pemerintah; kebenaran Allah dipandang sempurna tetapi kebenaran manusia dianggap berkerja secara ekternal dan tidak sempurna, namun tetap dibutuhkan. “Huldrych Zwingli (1484-1531),” 164-165.

²³ McGrath, *Reformation Thought*, 211-214. Cameron menjelaskan bahwa setelah terjadi perdebatan antara dirinya dan kaum Anabaptis, Zwingli mendorong pemerintah untuk lebih berperan dalam persoalan keagamaan, khususnya membantu gereja untuk memberikan disiplin kepada orang-orang yang tidak taat pada kebenaran (ajaran gereja). The European Reformation, 153.

²⁴ Bdk. McGrath, *Reformation Thought*, 211-214. Pandangan inilah yang membedakan Zwingli dari kelompok Anabaptis yang pada mulanya menjadi pengikut Zwingli.

²⁵ McGrath, *Reformation Thought*, 2011-214.

Pandangan reformator ketiga yang akan kita bicarakan adalah John Calvin. Pemikiran Calvin²⁶ mengenai hubungan gereja dan negara²⁷ adalah sbb: Pertama, Calvin percaya dengan gagasan/ajaran dua kerajaan sebagaimana diajarkan oleh Luther, gereja disebut Calvin sebagai *regnum spiritual* dan negara sebagai *regnum politicum*;²⁸ Allah adalah pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam gereja maupun negara.²⁹ Kedua, Calvin melihat bahwa gereja dan negara haruslah ada pemisah, walaupun gereja dan negara adalah sama-sama menyandang “pedang” dari Allah, namun negara tidak boleh mencampuri urusan gereja.³⁰ Di sisi yang lain lagi, Calvin percaya bahwa walaupun keduanya berbeda namun pada kenyataannya mereka terikat satu dengan yang lain, dan Calvin percaya negara haruslah mendukung gereja, itulah sebabnya Calvin menyebut negara sebagai *adminiculum “external aid.”*³¹ Ketiga, tugas utama pemerintah ada dua yaitu: (i) pemerintah harus menjaga gereja baik dalam penyembahan (ibadah), ajaran, maupun keberadaan gereja; (ii) pemerintah harus menjaga etika, moralitas dan kemamaman dalam masyarakat melalui--salah satunya--penegakkan hukum.³² Keempat, Calvin berpandangan bahwa saat pemerintah jatuh dalam kejahatan dan ketidakadilan, gereja tetap harus taat dan tunduk kepada pemerintah (tidak memberontak) dan berdoa kepada Tuhan yang dapat mengubah hati raja ataupun pemimpin lainnya;³³ Di sisi yang lain, Calvin berpandangan pelawanannya terhadap pemerintah yang korup/jahat dapat

²⁶ Padangan Calvin mengenai negara dipengaruhi oleh Martin Bucer; ia memandang negara dan gereja tidaklah terpisahkan, para pengkhotbah bertugas untuk menyampaikan Firman Tuhan dan para pejabat bertugas untuk menerintah (mengelola) berdasarkan apa yang diajarkan oleh pengkhotbah. McGrath, *Reformation Thought*, 214.

²⁷ Untuk melihat perkembangan pemikiran dan pergumulan Calvin mengenai kepemimpinan baik dalam gereja maupun negara, lih. Robert M. Kingdon, “Church and State,” in *The Calvin Handbook*, 355-356.

²⁸ Dolf Britz, “politics and Sosial Life,” 440-441.

²⁹ Lih. Dolf Britz, “politics and Sosial Life,” 442.

³⁰ Jan S. Aritonang, *Berbagai Aliran di Dalam dan di Sekitar Gereja* (Jakarta: BPK, 1995), 79.

³¹ Lih. Inst. IV.1.1

³² Dolf Britz, “politics and Sosial Life,” 443-445.

³³ Dolf Britz, “politics and Sosial Life,” 445-446. Calvin percaya bahwa pemerintah jahat pun dipakai Tuhan untuk kebaikan umat Tuhan (gereja).

dilakukan jika tindakan/gerakan tersebut dipimpin oleh pemerintah/pejabat pemerintah yang lain (namun bukan gereja yang memimpin).³⁴

Pandangan terakhir yang perlu didiskusikan adalah pandangan dari kelompok reformasi radikal (Anabaptis)³⁵ terhadap hubungan gereja dan negara juga penting untuk dibicarakan sebab pemikiran mereka mewakili pandangan yang memisahkan secara tajam hubungan antara gereja dan negara. Pemikiran aliran Anabaptis mengenai pemerintah nampak dalam poin 4 dan 6 dalam Pengakuan Iman Schleitheim; dalam bagian tersebut ditegaskan sbb:

Pertama, “Orang-orang percaya haruslah memisahkan diri dari dunia yang jahat ini, termasuk dari “gereja negara” baik dalam negara-negara yang berpegangan pada ajaran Katolik Roma maupun Protestan”; **Kedua**, tugas utama dari pemerintah adalah untuk menghukum orang-orang jahat, itulah sebabnya senjata dari pemerintah adalah “pedang”; berbeda dengan pemerintah, gereja tidak boleh menggunakan kekerasan, itulah sebabnya anggota gereja tidak boleh menjadi pejabat negara.

Jika kita membandingkan pemikiran para reformator mengenai hubungan gereja dan negara, mereka memiliki pandangan yang berbeda dengan ajaran gereja Katolik Roma abad pertengahan yakni dengan membatasi bahkan memisahkan antara gereja dan negara; Luther, Zwingli dan Calvin cenderung untuk membatasi hubungan gereja dan negara,³⁶ sedangkan kelompok Anabaptis

³⁴ Dolf Britz, “politics and Social Life,” 446.

³⁵ Untuk melihat penjelasan mengenai asal mula kemunculan kelompok ini lih. McGrath, *Reformation Thought*, 10-11; Banyak pakar memasukan kelompok Menon sebagai kelompok reformasi radikal (anabaptis), Namun, Jan S. Aritonang menjelaskan bahwa kaum Anabaptis dan Menonite tidaklah identik, walaupun keduanya memiliki persamaan, namun tetap ada perbedaan di antara keduanya. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai sejarah perkembangan aliran ini lih. Berbagai Aliran Dalam Sejarah Gereja, 105-110.

³⁶ Aritonang, *Berbagai Aliran*, 109; Lane, *Runtuh Pijar*, 162.

³⁷ Cameron menjelaskan bahwa para reformator membatasi pengaruh dan negara/pemerintah terhadap ajaran gereja; Cameron menulis: “The realm of the spiritual concerned spiritual things and was distinct and autonomous from politics. Concepts such as the ‘headship of Christ in his church, and ‘the law of God’ were invoked to restrain politicians from tempering at will with the reformed church.” *The European Reformation*, 152.

memilih untuk memisahkan keduanya.³⁸ Sikap Luther, Zwingli dan Calvin terhadap keterlibatan orang Kristen/pejabat gereja dalam negara/pemerintahan juga sama, mereka cenderung untuk mendorong hal ini, sedangkan kaum Anabaptis membatasi bahkan melarang pengikutnya untuk menjadi pejabat negara. Sikap Luther dan Calvin terhadap negara yang tidak menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya juga sama, mereka melarang orang-orang Kristen untuk memberontak terhadap negara.

KETAATAN PADA PEMERINTAH DALAM ROMA 13:1-7

Setelah membahas secara singkat pemikiran Luther, Zwingli, Calvin dan aliran Anabaptis, kita sekarang akan menelaah pemikiran Paulus mengenai negara dalam kaitannya dengan umat Tuhan dalam Roma 13:1-7. Pembahasan ini penting sebab dasar utama dari sikap orang-orang Kristen terhadap pemerintah tidak bisa hanya didasarkan atas warisan pemikiran para reformator yang sifatnya “situasional dan kondisional” (terikat dengan situasi dan konteks tertentu), namun harus didasarkan pada apa yang Alkitab ajarkan kepada kita.

Pengantar kedalam Roma 13:1-7³⁹

Ada tiga isu yang harus kita bicarakan sebelum mendiskusikan isi ajaran Paulus dalam Rom. 13:1-7. Pertama, apakah bagian tersebut merupakan sisipan yang pada awalnya tidak ada. Menurut W. Munro, Roma 13:1-7 merupakan sebuah sisipan yang dimasukkan kedalam teks kemudian hari. Alasan yang diberikan adalah sebab teks tersebut memotong alur pemikiran Paulus dalam Roma 12:9-21 dan 13:8-10.⁴⁰ J. C. O'Neill—sebagaimana dijelaskan oleh Morris—

³⁸ Bdk. Cameron, *The European Reformation*, 152.

³⁹ Kebanyakan ahli memiliki pandangan bahwa jemaat Kristen Roma terkait dengan kehadiran orang-orang Yahudi dan kaum proselit dalam peristiwa Pentakosta (lih. Kis. 2.10). Lih. Moo, *Romans*, 17-18; Morris, *The Epistle to the Romans*, 3-4. Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut John Drane, kemunculan jemaat Roma terjadi disepertai peristiwa diusirnya orang-orang Yahudi dari Roma; peristiwa ini merupakan indikasi dari pemberitaan injil yang dilakukan di Roma. Bdk. John Drane, “Why Did Paul Write Romans?” *Pauline Studies: Essays Presented to Professor F. F. Bruce on his 70th Birthday*, eds. D. A. Hagner and Murray J. Harris (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), 218-219; Bdk. James D. G. Dunn, “Romans, Letter to,” *Dictionary of Paul and His Letters*, eds. Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, and Daniel G. Reid (Illinois: IVP, 1993), 838-839.

⁴⁰ Dikutip dari Moo, *Romans*, 421.

juga melihat hal yang sama, ia bahkan menganggap bagian tersebut bukan saja besifat *non-pauline* bahkan *non-christian*. Roma 13:1-7 berasal dari pemikiran Stoa.⁴¹ Bukti lain yang sering diajukan untuk memerlihatkan bahwa Roma 13:1-7 merupakan tambahan adalah jangkauan dan aplikasi pembahasan dalam Roma 13:1-7 bersifat spesifik tidak seperti dalam ps. 12 dan 13:8-14; selain itu dalam Roma 13:1-7 motivasi yang mendasari nasihat Paulus adalah ketetapan Allah, hal tersebut tidak muncul dalam bagian lain nasihat Paulus dalam ps. 12-15.⁴²

Moo memberikan respons yang baik, ia memerlihatkan bahwa Roma 13:1-7 sebenarnya ada kaitan dengan Roma 12, khususnya dengan ay. 17-21; Dalam bagian tersebut Paulus meminta supaya jemaat tidak menuntut pembalasan atas kejahatan yang mereka alami dan menyerahkan penghakiman dan penghukuman pada Tuhan; alasannya dari sikap tersebut dijelaskan Paulus dalam Roma 13:1-7, di mana pemerintahlah yang akan menjadi tangan Tuhan dalam menghukum kejahatan dilakukan oleh manusia (termasuk kejahatan yang dilakukan terhadap umat Tuhan).⁴³ Longenecker juga memberikan respons yang baik, ia memerlihatkan bahwa pembahasan mengenai ketataan kepada pemerintah dalam Roma 13:1-7 adalah hal yang wajar sebab persoalan pajak memang menjadi salah satu isu sosial yang terjadi pada tahun 50-an.⁴⁴

Jika kita menelaah teks Roma 13:1-7, kita tidak menemukan ada bukti-bukt eksternal yang menunjukkan bahwa teks itu pada mulanya tidak ada. Selain itu keberatan bukti internal yang diajukan oleh Munro dan O'Neill sudah dijawab dengan baik oleh para ahli, sehingga tidak ada alasan dan cukup bukti untuk menghilangkan bagian tersebut dari surat Roma.

Kedua, bagaimakah kita dapat memahami konteks historis dan logis dari teks tersebut?⁴⁵ Menurut Stein, kita tidak mungkin dapat merekonstruksi situasi

⁴¹ Morris, *The Epistle to the Romans*, 457.

⁴² Lih. Richard N. Longenecker, *Introducing Romans: Critical Issues in Paul's Most Famous Letter* (Grand Rapids: Eerdmans, 2011), 432.

⁴³ Moo, *Romans*, 421.

⁴⁴ Longenecker, *Introducing Romans*, 432.

⁴⁵ Lihat penjelasan Grant R. Osborn, *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation* (Downers Grove: IVP, 1991), 19-21.

dan kondisi yang ada dibalik penulisan Roma 13:1-7.⁴⁶ Menurut penulis, walaupun sulit dan menimbulkan berbagai alternatif jawaban, kita sebenarnya masih dapat melihat indikasi-indikasi tertentu yang membuat Paulus memasukkan Roma 13:1-7 dalam surat yang dikirimkan kepada jemaat Roma. Para ahli memang kesulitan dalam menentukan tujuan dari kepenulisan surat Roma, meskipun demikian kesulitan ini disebabkan Paulus menuliskan surat tersebut bukan hanya dengan satu tujuan namun dengan beberapa tujuan.⁴⁷

Menurut Longenecker, Roma 13:1-7 dituliskan Paulus untuk menjawab situasi konkret yang dipergumulkan oleh jemaat Roma.⁴⁸ Berbeda dengan Longenecker, Westerholm memandang Roma 13:1-7 sebagai bagian dari Roma 12-16, bagian tersebut--menurut Westerholm--terbagi dalam tiga konteks aplikasi mengenai bagaimana orang Kristen harus hidup baik,⁴⁹ yakni dalam konteks masyarakat yang tidak mengenal Allah, dalam komunitas orang percaya, dan dihadapan Allah.⁵⁰ Roma 13:1-7 dituliskan untuk menjelaskan bagaimana orang Kristen harus hidup dalam masyarakat yang tidak mengenal Allah. Sedikit berbeda dengan Westerholm, Longenecker memandang salah satu alasan dari Paulus menuliskan Roma 13:1-7 adalah karena Paulus ingin mengajarkan mengenai tanggung jawab sosial dari orang-orang Kristen.⁵¹ Kemungkinan yang

⁴⁶ Stein, "The Argument of Romans 13:1-7," 327. Lihat juga penjelasan Elliot, *Liberating Paul*, 218-221.

⁴⁷ Lih. Moo, *Romans*, 21-24. Lihat juga diskusi/perdebatan mengenai tujuan kepenulisan surat Roma dalam Karl P. Donfried (ed.), *The Romans Debate*, rev. and exp. ed. (Massachusetts: Hendrickson, 1991), 175-242; Bdk. Drane, "Why Did Paul Write Romans?," 208-227.

⁴⁸ Longenecker, *Introducing Romans*, 433.

⁴⁹ Stephen Westerholm menjelaskan bahwa tema utama dalam etika Paulus adalah mengenai 'the good.' Paulus memandang bahwa hal tersebut mengikat semua manusia, bukan hanya orang Yahudi tetapi juga orang Yunani; saat Paulus mengatakan bahwa manusia 'dilebaskan' dari ikatan hukum, manusia tetap terikat dengan "the good." Yang dimaksudkan dengan "the good" oleh Paulus adalah (i) kehidupan/perilaku yang hyuk/pantas dihadapan Allah; (ii) kehidupan/perilaku yang didasari dengan kasih seorang terhadap yang lain. Lih. *Understanding Paul: The Early Christian Worldview of the Letter to Romans*, 2nd. Ed. (Grand Rapids: Baker, 2004), 154-157.

⁵⁰ Westerholm, *Understanding Paul*, 157.

⁵¹ Longenecker, *Introducing Romans*, 433.

lainnya lagi, menurut Longenecker, adalah Paulus ingin “meng-kontekstual-kan” ajaran tentang kasih dalam konteks pergumulan nyata dari jemaat Roma.⁵²

Jika kita membaca paparan Paulus mengenai pemerintah dalam Roma 13:1-7, kita menemukan bahwa pemerintah yang dibicarakan Paulus adalah pemerintah yang ideal, pemerintah yang berperan sebagai hamba Allah yang secara bertanggung jawab menegakkan hukum/kedilan. Gambaran pemerintah yang seperti ini jelas tidak mungkin diidentikan dengan pemerintah Romawi yang berlaku kejam terhadap--khususnya--orang-orang Yahudi.⁵³ Di sisi yang lain, nasihat supaya orang-orang Kristen membayar pajak, sepertinya disampaikan terkait dengan situasi dan kondisi tertentu dalam jemaat Roma. Menurut penulis, situasi dan kondisi riil yang menyebabkan Paulus menuliskan surat Roma, terkait terutama dengan isu pajak yang dibahas dalam ay. 6-7.⁵⁴

Untuk melihat konteks historis nasihat Paulus dalam Roma 13:1-7, kita dapat membandingkannya dengan struktur argumentasi (konteks logis) yang Paulus tuliskan. Moo membagi struktur logis/argumentasi Paulus dalam Roma 13:1-7 menjadi 4 bagian yakni:⁵⁵ (i) nasihat/perintah untuk tunduk kepada pemerintah (1a); (ii) Alasan ketundukan orang Kristen kepada pemerintah (1b-4); (iii) penegasan ulang pentingnya ketundukan pada pemerintah (ay. 5); (iv) nasihat praktis mengenai bagaimana menyatakan ketundukan pada pemerintah, yakni dengan membayar pajak (ay. 6-7). Sedikit berbeda dengan Moo, Stein melihat Roma 13:1-7 membentuk sebuah struktur “chiasmus” sbb:⁵⁶

1a General command

1b-1c The first ground for general command of 1a

2a The result of 1b-c

⁵² Longenecker, *Introducing Romans*, 432.

⁵³ Untuk melihat kondisi politik dari kekasiran Romawi di era Paulus, lih. Elliot, *Liberating Paul*, 223-224.

⁵⁴ Dalam catatan sejarah yang dituliskan oleh Cornelius Tacitus dikatakan bahwa pada tahun 58, terjadi protes yang cukup keras di Italia terkait dengan korupsi pajak oleh pejabat pemerintah. Bdk. Elliot, *Liberating Paul*, 219.

⁵⁵ Moo, *Romans*, 420.

⁵⁶ Stein, “The Argument of Romans 13:1-7,” 343.

- 2b the consequence of 2a
- 3a The second ground for general command of 1a
- 3b A positive example of 3a
- 4a the explanation of 3b
- 4b-c A negative example of 3a
- 4d The explanation of 4b-c
- 5 A Chiasmic Summary of 1-4
 - Wrath - 3-4
 - Conscience - 1b-2
- 6 The argument from practice
- 7 Specific Command

Dilihat dari struktur argumentasinya, nasihat riil Paulus kepada jemaat Roma jelas terdapat dalam ay. 6-7 yakni mengenai keharusan dalam membayar pajak dan cukai. Bagian nasihat ini merupakan bagian penting dari alur argumentasi Paulus, sebab bagian tersebut mencerminkan hal apa yang Paulus ingin jawab dari pergumulan jemaat yang dikirimnya surat (jemaat Roma).

C. S. Mott memiliki kesimpulan yang mirip, ia memandang bahwa konteks pembahasan Paulus dalam Roma 13:1-7 terkait dengan isu kebebasan (*freedom*); Paulus menegaskan bahwa dibebaskannya mereka dari ikatan hukum Taurat tidak berarti mereka terbebas dari *civil law*.⁵⁷ Mott menggunakan peristiwa yang terjadi dalam jemaat Korintus sebagai sebuah contoh nyata bahwa ajaran tentang kebebasan (*freedom*) dapat menghasilkan kesimpulan yang salah.⁵⁸ Salah satu argumentasi yang diberikan oleh Mott adalah kemunculan nasihat/perintah supaya jemaat Kristen di kota Roma membayar pajak; tindakan membayar pajak merupakan bagian dari kewajiban seseorang terhadap *civil law*.⁵⁹

Penulis setuju dengan Mott bahwa persoalan pajak memang melatarbelakangi tulisan Paulus dalam Roma 13:1-7. Meskipun demikian, menurut penulis alasan yang diberikan oleh Mott kurang memuaskan. Jika kita melihat surat-surat Paulus, ia membahas kaitan antara hukum Tuhan dan

⁵⁷ Mott, “Civil Authority,” *Dictionary of Paul and His Letter*, 142.

⁵⁸ Mott, “Civil Authority,” 142.

⁵⁹ Mott, “Civil Authority,” 142.

kebebasan dari hukum secara seimbang; Paulus membicarakan kebebasan dari hukum dalam konteks sejatah keselamatan namun bukan dalam konteks tanggung jawab moral dari sosial. Argumentasi yang Mott ajukan yakni persoalan makanan yang muncul dalam jemaat Korintus, menurut penulis, kurang kuat. Persoalan yang muncul dalam jemaat Korintus tentang makanan--menurut penulis--bukanlah sekadar berakar pada persoalan "kebebasan," namun berakar pada persoalan "aturan makan" yang belum tuntas dibicarakan dalam persidangan di kota Yerusalem (Kis 15). Persoalan makanan pertama kali muncul; dalam Galatia 2:11-14 dalam insiden Anthiokhia. Persoalan yang sama juga muncul dalam jemaat Korintus (lih. 1 Korintus 8) dan jemaat Roma (Roma 14:6; 20-23). Apakah persoalan makan yang muncul dalam surat Korintus memiliki kaitan dengan persoalan yang muncul dalam jemaat yang lain? Jika kita membandingkan dengan keputusan yang disampaikan oleh persidangan di Yerusalem (Kis. 15: 29), kita menemukan bahwa isu yang muncul dalam Korintus dan Roma adalah pararel. Namun, kita harus mengingat bahwa isu makanan yang dibicarakan dalam persidangan di Yerusalem terkait dengan isu penerimaan bangsa bukan Yahudi dalam komunitas Kristen. Seperti halnya dengan insiden di kota Antiokhia (Gal. 2:11-14), orang Yahudi di Korintus dan Roma tidak dapat makan bersama dengan orang bukan Yahudi karena--salah satunya--adat istiadat ini (orang bukan Yahudi makan makanan bekas persembahan berhala).⁶⁰ Dengan demikian, persoalan makanan dalam jemaat Korintus muncul karena sekadar persoalan kebebasan, namun persoalan ketidakmampuan dalam menerima jemaat lain yang berbeda identitas dengannya.

Sebagian ahli lain menganggap latar belakang dari Roma 13:1-7 adalah Paulus melihat adanya potensi dari orang-orang Kristen Yahudi di kota Roma untuk melawan pemerintah melalui--setidaknya dengan--tidak membayar pajak. Sikap yang demikian muncul karena orang-orang Kristen Yahudi pernah mengalami "pengusiran" dari kota Roma oleh kaisar Claudius dan karena pengaruh dari kelompok Zelot yang bersikap "anti-pemerintah asing."⁶¹

⁶⁰ Lih. Chandra Gunawan, "Rekonstruksi Terhadap Insiden Galatia dan Aplikasinya Bagi Pergumulan Gereja Masa Kini Mengenai Perbedaan Etnis," *Stulos* 8/2 (September 2009): 240-243.

⁶¹ Morris, *The Epistle to the Romans*, 458; Elliot, *Liberating Paul*, 219.

Menurut penulis, argumentasi di atas adalah kurang kuat. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi di Roma, nampaknya sulit untuk dimengerti bahwa orang-orang bukan Yahudi di kota Roma terpengaruh oleh semangat "holy war" dari kaum Zelot. Salah satu alasannya adalah sebab hubungan orang Kristen Yahudi dan bukan Yahudi di kota Roma sepertinya bermasalah, sebagaimana terindikasi dalam ps. 9-11 dan 14-15.⁶² Jika orang-orang Kristen bukan Yahudi di kota Roma kurang menerima/menaruh hormat terhadap orang-orang Kristen bukan Yahudi, nampaknya tidak mungkin mereka kemudian menaruh simpati untuk perjuangan politik orang-orang Yahudi. Menurut penulis, peristiwa permasalahan sosial terkait dengan pajak yang terjadi tahun 58 lebih tepat menjadi latar belakang penulisan Roma 13:1-7.⁶³

Menurut Morris Roma 13:1-7 terkait dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh jemaat Kristen di kota Roma--khususnya dari orang-orang Kristen Yahudi yang mengalami kesulitan dalam bersikap terhadap pemerintah; mereka terjatuhan dalam kondisi serba salah, jika mereka mengidentikan diri dengan gerakan agama Yahudi, mereka mungkin mengalami perlindungan dari pemerintah sebaliknya.

⁶² Bdk. Drane, "Why Did Paul Write Romans?" 210-211. Drane sebenarnya setuju dengan usulan pemikiran bahwa Paulus menuliskan surat Roma untuk menjelaskan persoalan hubungan Yahudi dan bukan Yahudi sebab (i) dalam surat Roma Paulus menyerang orang-orang Kristen bukan Yahudi malah memuji mereka; (ii) kerena je ini bukan dirintis oleh Paulus, maka Paulus tidak mungkin memahami persoalan je ini terlalu dalam. Menurut penulis argumentasi Drane kurang meyakinkan sebab dalam surat-surat Paulus, ia tidak selalu langsung mengkritik jemaat yang memiliki persoalan misalnya saja dalam surat Korintus, Paulus tidak langsung menyerang jemaat terhadap dengan kritik-kritik yang tajam , namun tetap memberikan pujian tertentu bagi jemaat (lih. 1 Kor. 1:4-9). Sedangkan untuk argumentasi bahwa Paulus tidak cukup menyerang jemaat Roma, menurut penulis hal tersebut sulit untuk dibuktikan. Jika kita meninjau Roma 12-15, kita menemukan bahwa nasihat Paulus dalam jemaat ini cukup perspektif itu berarti Paulus mengetahui cukup banyak jemaat Roma. Demikian juga jika membaca Roma 16, di sana Paulus memberikan salam kepada cukup banyak orang Yahudi yang ada di kota Roma.

⁶³ Elliot memandang bahwa tujuan Paulus sebenarnya bersifat praktis untuk menghindarkan jemaat Roma dari persoalan yang akan muncul jika mereka tidak membayar pajak. *Liberating Paul*, 219. James D. G. Dunn melihat yang sama bahwa tujuan Paulus menuliskan Roma 13:1-7 terkait dengan persoalan pajak. Paulus mengimbau jemaat untuk membayar pajak sebab tindakan tidak membayar pajak berpotensi dalam membawa jemaat Roma--yang berbentuk gereja rumah--dalam keadaan yang berbahaya. *The Theology of Paul the Apostle* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), 67!

kekaisaran Roma pada waktu itu menghormati hak-hak orang Yahudi, namun jika mereka mengidentifikasi dirinya sebagai agama yang berbeda, maka mereka dalam keadaan tanpa perlindungan.⁶⁴

Apa yang dituliskan oleh Morris ada benarnya. Jika kita melihat Roma ps. 1-11, kita akan menemukan bahwa Paulus jelas membicarakan mengenai hubungan Yahudi dan bukan Yahudi.⁶⁵ Jika kita melihat konteks historis yang terjadi pada tahun 49/50M; ketika itu terjadi pengusiran atas orang-orang Yahudi dari kota Roma oleh Kaisar Claudius.⁶⁶ Hal ini menyebabkan orang-orang Kristen Yahudi yang ada di kota tersebut harus meninggalkan gereja mereka. Akibatnya, gereja di kota Roma sekarang dipenuhi oleh orang-orang Kristen bukan Yahudi. Persoalan mulai muncul saat orang-orang Kristen Yahudi kembali ke kota Roma⁶⁷ dan mendapati gereja mereka sekarang sudah berada dalam kondisi yang berbeda; Hubungan di antara kedua kelompok Kristen ini berpotensi menimbulkan persoalan.⁶⁸ Itulah sebabnya orang-orang Kristen bukan Yahudi di kota Roma akan mengalami kesulitan jika mereka harus mengidentifikasi diri mereka kembali sebagai bagian dari "agama Yahudi" sebab mereka sekarang adalah mayoritas dalam gereja, namun di sisi yang lain, jika mereka tidak melakukan hal tersebut eksistensi mereka akan terancam oleh pemerintah.

⁶⁴ Morris, *The Epistle to the Romans*, 458.

⁶⁵ Dalam ps. 1-3 Paulus berbicara mengenai keberdosaan baik orang Yahudi dan bukan Yahudi; kemudian dalam ps. 4-8 Paulus membicarakan mengenai keselamatan yang sama yang dikerjakan Kristus baik kepada orang Yahudi maupun bukan Yahudi; dalam ps. 9-11 Paulus berbicara mengenai bagaimana orang bukan Yahudi harus memandang dan bersikap terhadap orang-orang bukan Yahudi.

⁶⁶ Drane menjelaskan bahwa sikap orang-orang Yahudi terhadap kekristenan Roma berbeda-beda; perbedaan sikap inilah yang melahirkan keributan di Roma mengenai sosok pribadi yang disebut "christus," keributan inilah yang membuat pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Roma di zaman Claudius. "Why Did Paul Write Romans?", 216-217.

⁶⁷ Orang-orang Yahudi—termasuk orang-orang Kristen Yahudi—mulai diijinkan kembali memasuki Roma pada awal masa pemerintahan Nero sekitar tahun 54M. Bdk. Drane, "Why Did Paul Write Romans?", 217.

⁶⁸ Bdk. Drane, "Why Did Paul Write Romans?", 218.

Menurut Philip H. Towner, tujuan Paulus menuliskan Roma 13:1-7 ~~harus~~ dilihat dari perspektif misi.⁶⁹ Salah satu tujuan penulisan surat Roma ~~adalah~~ untuk mempersiapkan jemaat tersebut supaya saat Paulus melakukan ~~perjalanan~~ misi ke Spanyol, mereka dapat membantu dan menolong Paulus (Roma 15:24); meskipun demikian gagasan misi Paulus bukanlah sekadar bersifat teritorial, namun bersifat eskatologikal.⁷⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut, Paulus memandang jemaat-jemaat Tuhan haruslah dipersiapkan secara internal dan eksternal; secara internal dengan jalan membenahi hubungan Yahudi dan bukan Yahudi, dan secara eksternal jemaat-jemaat Kristen harus turut serta dalam menjaga stabilitas kondisi masyarakat.⁷¹ Roma 13:1-7 dituliskan Paulus untuk menjawab kebutuhan kedua dari aspek di atas, yakni menjaga stabilitas kondisi masyarakat sehingga pemberitaan injil menjadi lebih efektif.⁷²

Salah satu pertanyaan penting yang kita harus jawab saat mendiskusikan konteks Roma 13:1-7 adalah "apakah ajaran mengenai ketaatan kepada pemerintah yang disampaikan Paulus juga berlaku bagi pemerintah yang lalim?" Westerholm menulis:⁷³

Paul does not discuss what should be done when rulers fail to promote good or to curb evil. Romans is not, after all, a systematic treatise on life in society, but a letter to a particular community at a particular time. Paul must have felt that existing circumstances required no more than the broadest statement of principle.

Hal yang sama ditegaskan oleh Stein, "... it should be noted that Paul is not speaking about state which punishes good and rewards evil. As a result it is precarious to apply the positive statement of divine authorization found in Romans 13:1-7 to such a

⁶⁹ Philip H. Towner, "Romans 13:1-7 and Paul's Missiological Perspective: A Call to Political Quietism or Transformation?" *Romans & The People of God*, edd. Sven K. Soderlund & N. T. Wright (Grand Rapids: Eerdmans, 1999), 149-169.

⁷⁰ Towner, "Romans 13:1-7 and Paul's Missiological Perspective," 152-153.

⁷¹ Towner, "Romans 13:1-7 and Paul's Missiological Perspective," 153-155. Menurut Towner, gagasan mengenai kesatuan tubuh Kristus dalam ps. 12:4-8; pentingnya kasih yang Paulus bicarakan dalam kaitannya antara jemaat yang lemah dan kuat dalam ps. 14:4-12, juga ajaran kasih dalam Roma 13:8-10, dituliskan Paulus dalam terkait dengan isu hubungan Yahudi dan Gentile.

⁷² Towner, "Romans 13:1-7 and Paul's Missiological Perspective," 153.

⁷³ Westerholm, *Understanding Paul*, 158.

*state?*⁷⁴ Apa yang dikatakan oleh Westerholm dan Stein adalah benar, Paul memang tidak mengatakan bahwa ia sedang membicarakan pemerintah Rom gambaran mengenai pemerintah yang Paulus bicarakan dalam Roma 13:1-5 jauh berbeda dari kondisi riil kekaisaran Roma.⁷⁵

Herman Ridderbos menunjukkan bahwa Paulus dalam surat-suratnya tidak selalu berkata bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah sesuatu yang mutlak atau sesuatu yang dilakukan secara membabi buta; Paulus sendiri dalam Korintus 2:8 mencela—apa yang disebut—penguasa dunia ini yang telah menyalibkan Yesus; demikian juga dengan 1 Korintus 6:1-9, Paulus menegaskan jemaat-jemaat Kristen yang karena perselisihan kemudian membawa persoalan mereka ke pengadilan, perkataan ini mengindikasikan pandangan Paulus yang memandang “pengadilan” sebagai lembaga yang “duniawi.”⁷⁶

Dengan demikian, kita melihat memang ada cukup banyak indikasi yang menjadikan kemungkinan alasan mengapa Paulus menuliskan Roma 13:1-7. Meskipun demikian, salah satu indikasi yang utama yang menjadi penyebab dituliskannya bagian ini adalah persoalan pajak. Jika kita membandingkan konteks pergumulan Paulus dan jemaat Roma dengan konteks pergumulan de jure para reformator, kita melihat bahwa ada perbedaan yang jelas di antara keduanya.

Ketiga, tradisi apakah yang ada dibelakang nasihat Paulus mengenai ketaatan pada pemerintah. Menurut Mott, ajaran Paulus mengenai *civil authority* bersumber pada tradisi “Hellenistic Judaism.”⁷⁷ Stein memerlukatkan bahwa

⁷⁴ Stein, “The Argument of Romans 13:1-7,” 334-335.

⁷⁵ Bdk. Elliot, *Liberating Paul*, 223-224. Berbeda dengan pandangan ini, menurut Dunn, Paulus menasihati jemaat Roma untuk memiliki sikap diam dan menjaga ketenangan sebab itulah cara yang terbaik bagi mereka untuk bertahan dan sekali lagi untuk memberitakan injil dengan lebih efektif. Dunn mengingatkan juga untuk kita tidak melihat pergumulan mereka dari kaca mata abad 20 dengan sistem demokrasinya. *The Theology of Paul the Apostle*, 680.

⁷⁶ Ridderbos, *Paulus*, 341-342.

⁷⁷ Mott, “Civil Authority,” 142. Istilah “Hellenistic Judaism” pada umumnya digunakan untuk membicarakan kelompok atau aliran Yahudi yang lebih lunak sikapnya terhadap hellenisasi; kelompok ini berbeda dengan kelompok Yahudi dari Yerusalem yang disebut “Palestinian Judaism.”

prinsip yang Paulus ajarkan dalam Roma 13:1 “tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah” pararel baik dengan ajaran PL (misalnya dalam Yer. 27:5; Dan 4:17) maupun tulisan intertestamental (misalnya dalam Wars, II, 140 dan Wis 6:1-3).⁷⁸

Menurut Eduard Lohse gagasan mengenai pentingnya ketundukan kepada pemerintah juga ada dalam pemahaman Yunani.⁷⁹ Kaum Stoia mengajarkan bahwa manusia haruslah hidup sesuai atau selaras dengan natur; yang dimaksudkan dengan “natur” oleh kaum Stoia adalah tatanan yang sudah diatur dan teratur, pemerintah ada memang untuk mengatur, jadi tugas manusia memang adalah untuk hidup teratur atau sesuai dengan aturan. Selain itu kaum Stoia juga mengajarkan mengenai pentingnya manusia membangun kesejahteraan dalam masyarakat.⁸⁰

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan Paulus dalam batasan tertentu dapat memiliki kesejajaran dengan pandangan Stoia.⁸¹ Meskipun demikian, apakah Paulus terpengaruh ajaran Stoia? Hal ini tidak dapat dipastikan sebab pemikiran Paulus bukan hanya sejajar dengan kelompok Stoia, namun juga sering kali sejajar dengan ajaran PL. Hal yang sama terjadi dengan ajaran etis Paulus dalam Roma 13:1-7, walaupun ada kemungkinan bahwa Paulus memiliki gagasan yang pararel dengan kelompok Stoia, namun kesejajaran yang sama juga muncul antara Paulus dan PL.

Dalam PL, khususnya berita yang disampaikan oleh nabi-nabi pembuangan dan paska-pembuangan, kita memang menemukan adanya pesan-pesan yang mendorong umat Tuhan untuk bertahan bahkan berpartisipasi aktif dalam kota-kota di mana mereka dibuang.⁸² Salah satunya adalah Yeremia 29:7.⁸³ Menurut

⁷⁸ Stein, “The Argument of Romans 13:1-7,” 329; Moo melihat hal yang pararel bahwa nasihat Paulus dalam ay. 1 terkait dengan PL. Moo, *Romans*, 422.

⁷⁹ Eduard Lohse, *Theological Ethics of the New Testament* (Minneapolis: Fortress, 1991), 131-132.

⁸⁰ Lohse, *Theological Ethics*, 132.

⁸¹ Lih. Chandra Gunawan, “Etika Paulus; bagaimana Memahami dan Menelaahnya,” *Te Deum* 2.1 (Januari-Juli 2012); 205-209.

⁸² Bdk. Dunn, *Theology of Paul the Apostle*, 676.

Keown dkk, melalui bagian ini ‘*Jeremiah’s audience is invited to abandon hope in a ‘revolt’ against Babylon, which has been inspired by the false prophets’ promises that God would bring the exiles back in sort time, and to place their hope instead in the Lord and a new life.*⁸⁴ Dari paparan ini, kita melihat bahwa ada dua sudut pandang teologi yang ada dalam bangsa Israel saat berhadapan dengan pembuangan, yakni melakukan *holy war* atau menantikan *God’s restoration*.

Jika kita membaca tulisan-tulisan Yahudi era bait Allah kedua, kita akan menemukan bahwa sikap orang-orang Yahudi di era tersebut terhadap keberadaan orang bukan Yahudi adalah beragam.⁸⁵ Dua sikap yang muncul era pembuangan, sebenarnya juga muncul di era Yesus dan Paulus. Thielman menjelaskan demikian:⁸⁶

Most Jews believed that the Mosaic covenant distinguished Israel from the surrounding nation, and virtually all Jews believed that it was gracious sign of God’s election. Many believed that Israel lived in the period of punishment for disobedience to the law and awaited a time when God would intervene powerfully to remark the rebellious heart of his people and live among his people by his holy spirit and restore his people’s fortune. Some felt that acquittal before God on the final day would come to those who freely chose to obey God’s laws; others believed humanity to be so sinful that true obedience would come only as a result of God’s prior work in the human heart.

Sikap orang-orang Yahudi terhadap pemerintah asing pun beragam, sebagian kelompok Yahudi--misalnya saja kelompok Makabe--memang bersikap keras terhadap pemerintah asing, namun sebagian kelompok Yahudi yang lain bersikap lebih terbuka; misalnya saja penulis Hikmat Salomo--seperti halnya Paulus--menegaskan bahwa otoritas dari raja itu adalah dari Tuhan (lih. Wis. 6:1).

⁸³ Selain bagian ini, Yesaya 40:23-24 juga membicarakan hal yang sama. Lih. Moes, *Romans*, 425.

⁸⁴ Gerald L. Keown, Pamela J. Scalise & Thomas G. Smothers, *Jeremiah 26-27*. WBC 27 (Dallas: Word, 1995), 72.

⁸⁵ Lih. Chandra Gunawan, “Ketegangan Hubungan Yahudi dan Bukan Yahudi dalam Yudaisme Bait Allah Kedua dan dalam Surat Galatia,” *Veritas* 12/1 (April 2011), 85-99.

⁸⁶ Frank Thielman, *Paul & The Law: A Contextual Approach* (Illinois: IVP, 1994), 6.

4), demikian juga dengan Rabbi Hanania yang menyuruh murid-muridnya untuk mendoakan kesejahteraan pemerintah.⁸⁷

Jika kita melihat pandangan Paulus terhadap pemerintah Romawi, kita melihat adanya indikasi bahwa Paulus mengalami perubahan pemikiran dan sikap. Dalam Filipi 3, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai seorang yang “zealous” dalam hal ketiaatan pada agama Yahudi maupun dalam memegang aturan-aturan identitas yang memisahkan bangsa Israel dari Gentile. Itulah sebabnya jika dalam Roma 13:6-7, Paulus meminta jemaat untuk membayar pajak (mendukung pemerintah Romawi), itu terjadi karena ada sesuatu yang berubah dari cara pandang Paulus terhadap pemerintahan kaum Gentile. Namun, apakah penyebab dari perubahan ini?

Kemiripan pesan yang Paulus tulisan dalam ay. 7 dengan perkataan Yesus mengenai rasa hormat yang harus diberikan kepada kaisar (Mark. 12:17), menunjukkan bahwa ajaran Paulus kemungkinan bersumber dari tradisi/ajaran Yesus.⁸⁸ Paulus mungkin mengutip ajaran Yesus untuk menunjukkan bahwa perubahan sikapnya terhadap pemerintah berhubungan dengan ketaatannya pada perintah Yesus. Alternatif kemungkinan yang kedua adalah setelah bertobat dan menerima panggilan untuk memberitakan inilah kepada bangsa bukan Yahudi, Paulus menjadi mengerti dan memahami bahwa janji restorasi dari para nabi pembuangan tidak digenapi dalam perjuangan melakukan *holy war*, namun digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus; cara pandang yang baru ini membuat Paulus harus menjawab pertanyaan bagaimana ia akan memandang pemerintah bukan Yahudi yang selama ini menjajah bangsa Israel. Kemungkinan pesan dari nabi-nabi pembuangan seperti Yeremia memengaruhi Paulus sehingga ia mendorong umat Kristen di kota Roma untuk terlibat dalam menguasahkan kesejahteraan negri dan masyarakat mereka.

Siapakah yang dimaksudkan dengan “pemerintah” dalam Roma 13:1-7.

⁸⁷ Lohse, *Theological Ethics*, 133.

⁸⁸ Bdk. David Wenham, *Paul: Follower of Jesus or Founder of Christianity?*, 253-254. Selain dalam Roma 13:7, ajaran etis Paulus mengenai kasih (ps. 12:14, 17, 21; 13:8) berarel dengan ajaran tentang kasih dari Yesus. Longenecker, *Introducing Romans*, 432; Cranfield, *Romans*, 324; Bdk. Dunn, *The Theology of Paul the Apostle*, 676-677.

Paulus menggunakan sebuah istilah yang unik untuk membicarakan pemerintah yakni *eksusias*. C. E. B. Cranfield menjelaskan bahwa istilah “eksusia” dapat merujuk kepada dua pengertian yakni “civil authority” dan kuasa atau kekuatan supranatural yang ada dibalik pemerintah meskipun demikian Cranfield melihat bahwa dalam Roma 13:1-7 Paulus menggunakan istilah tersebut hanya dalam konteks “civil authority”. Oscar Cullmann, sebagaimana dituliskan oleh Stein, memandang bahwa istilah *eksusias* yang digunakan oleh Paulus menunjuk kepada “*the invisible angelic powers that stand behind the State government.*”⁹⁰ Kesimpulan yang sama sebagaimana dijelaskan oleh Moo-dimiliki oleh Karl Barth, istilah tersebut digunakan untuk membicarakan orang-orang yang mempunyai kekuatan supranatural tertentu.⁹¹ Berbeda dengan Cullmann dan Barth, Lohse menjelaskan bahwa dalam dunia Yunani dan Romawi, istilah *eksusia* digunakan untuk membicarakan “local authorities.”⁹²

Stein dan Moo memberikan argumentasi yang baik dalam merespons pandangan di atas. Menurut Stein, istilah *eksusias* yang Paulus gunakan tidak mungkin menuju kepada kekuatan supranatural yang ada dibalik pemerintah, salah satu alasannya adalah dalam tulisan Paulus istilah *eksusias* yang digunakan dalam konteks supranatural selalu digunakan untuk menuju kepada kuasa jahat dan Paulus tidak pernah diperintahkan supaya orang-orang percaya mentaati kekuatan yang demikian.⁹³ Moo memiliki pandangan yang pararel dengan Stein dan menurutnya istilah tersebut memiliki arti semua orang yang duduk dalam pemerintahan.⁹⁴

Istilah *eksusia* (dalam berbagai bentuknya) muncul sebanyak 102 kali dalam surat Paulus dan dalam surat Roma muncul 27 kali; dalam surat Roma istilah tersebut

⁸⁹ Cranfield, *Romans*, 320.

⁹⁰ Stein, “The Argument of Romans 13:1-7,” 328.

⁹¹ Moo, *Romans*, 421-422.

⁹² Lohse, *Theological Ethics*, 134.

⁹³ Stein, “The Argument of Romans 13:1-7,” 328.

⁹⁴ Moo, *Romans*, 422.

muncul 4 kali, tiga di antaranya muncul dalam Roma 13:1-7.⁹⁵ Louw dan Nida menempatkan istilah *eksusia* dalam 4 semantic field yakni:⁹⁶ pertama, kelompok kata yang digunakan dalam konteks ‘mengontrol/mengendalikan sesuatu’; Kedua, kelompok kata yang digunakan dalam konteks kekuatan atau kekuasaan; ketiga, kelompok kata yang digunakan dalam konteks makhluk atau kuasa supranatural; keempat, kelompok kata yang digunakan dalam konteks proses berpikir seseorang mulai dari mengumpulkan informasi sampai membuat kesimpulan. Dilihat dari konteks Roma 13:1-7, istilah *eksusia* digunakan Paulus dalam konteks wewenang untuk mengontrol/mengendalikan sesuatu yakni kejahatan; dan dilihat dari konteks ini, istilah *eksusia* memang lebih tepat diartikan sebagai negara/pemerintah.

Apakah artinya “tunduk” kepada pemerintah dan mengapa harus tunduk kepada mereka?

Istilah “tunduk” yang digunakan oleh LAI merupakan terjemahan dari istilah *hypotassou*. GNB dan Moffatt menerjemahkan istilah tersebut dengan *obey*, sedangkan NIV menerjemahkan istilah tersebut sebagai *submit*. Morris menejelaskan bahwa istilah *hypotassou* digunakan juga oleh Paulus dalam 1 Korintus 16:16 dan Efesus 5:21; istilah tersebut digunakan Paulus dalam konteks hubungan sesama umat Tuhan, dalam konteks ini istilah *hypotassou* dapat diartikan sebagai sikap orang percaya untuk merendahkan dirinya dan menghormati seorang terhadap yang lain; konteks pengertian ini tentu berbeda dari konteks penggunaan istilah *obey* yang memiliki nuansa hubungan “atasan-bawahan.”⁹⁷ Menurut Morris, Paulus menggunakan istilah *hypotassou* dalam Roma 13:1-7 dalam konteks yang pararel dengan 1 Korintus 16:16 dan Efesus 5:21, di mana tindakan

⁹⁵ Sutanto, *Perjanjian Baru Interlinear*, 289-290,

⁹⁶ Louw & Nida, *Greek-English Lexicon Vol. 2*, 92; *Greek English Lexicon Vol. 1*, 136, 349, 472, 680.

⁹⁷ Morris, *The Epistle to the Romans*, 461.

"tunduk" yang dimaksudkan Paulus terkait dengan sikap merendah diri dihadapan pemerintah sebuah lembaga tersebut seperti halnya orang percaya yang lain merupakan "Christ representative".⁹⁸

Dalam ayat 1b Paulus menegaskan bahwa alasan mengapa orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah adalah sebab pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, dibalik pemerintah terdapat otoritas Tuhan, itulah sebabnya orang-orang yang melawan otoritas pemerintah akan membawa mereka kepada konsekuensi mendapatkan krima "penghukuman" Allah; konsekuensi dari keyakinan ini adalah manusia tidak boleh melawan pemerintah.⁹⁹

Menurut Stein, ada alasan lain yang Paulus tegaskan dari keharusan untuk tunduk kepada pemerintah yakni karena pemerintah berperan sebagai "hamba Allah." Istilah *gar* "karena itu" yang muncul dalam ayat 1 pada umumnya menunjukkan bahwa bagian yang Paulus sedang bicarakan merupakan kesimpulan dari apa yang dinyatakan sebelumnya. Menurut Stein, dalam Roma 13:3-4 istilah *gar* digunakan untuk memerlukan argumentasi Paulus yang kedua dari keharusan untuk tunduk pada pemerintah dilihat dari aspek "practical reason"; dengan perkataan lain, istilah *gar* yang Paulus gunakan bukan menunjuk pada kelanjutan ayat 1b-2 (mengenai otoritas ilahi yang ada pada pemerintah), namun menunjuk pada ay.1a (mengenai pentingnya kettaatan pada pemerintah). Jadi, tidak ada kaitan langsung antara "murka Allah" yang akan diberikan kepada orang yang melawan pemerintah (ay. 2b) dan panggilan pemerintah untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat (ay. 4b).

Pemisahan gagasan "murka Allah" yang akan diberikan pada orang yang melawan pemerintah dalam ay. 1 dengan tugas pemerintah untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dalam rangka membalaskan murka Allah (ay. 4b) membawa konsekuensi pada tidak betwenangan

⁹⁸ Morris, *The Epistle to the Romans*, 461.

⁹⁹ Bdk. Stein, "The Argument of Romans 13:1-7," 332.

¹⁰⁰ Stein, *The Argument of Romans 13:1-7*, 322-333.

pemerintah untuk menghukum orang-orang yang melawan mereka. Sebaliknya, jika ay. 4b (panggilan pemerintah untuk membalaskan murka Allah) dianggap merupakan konsekuensi dari ay. 1b (maka Allah akan diberikan kepada orang yang melawan pemerintah), maka pemerintah memiliki otoritas dari Tuhan untuk menghukum orang-orang yang melawan mereka. Kerangka berpikir manakah yang ada dalam pemikiran Paulus waktu ia membahas Roma 13:1-4 tersebut?

Menurut penulis, ay. 3-4 dapat menunjuk pada ay. 1a (keharusan tunduk pada pemerintah) ataupun menunjuk pada ay. 1b-2 (diberikannya kuasa/otoritas dari Tuhan bagi pemerintah). Bagi Paulus keharusan taat kepada pemerintah harus dilihat bukan saja dari aspek pemberian otoritas/kuasa dari Tuhan bagi mereka, namun harus juga dilihat dari aspek tujuan dari pemberian otoritas tersebut oleh Tuhan yakni untuk berperan sebagai sebagai hamba Allah menjadi lembaga yang dipanggil Tuhan untuk menyatakan keadilan Allah dengan memberikan penghargaan kepada orang yang baik dan penghukuman bagi orang yang jahat.

Menurut penulis, Roma 13:1-7 tidak sekedar berbicara mengenai hubungan pemerintah dan orang-orang Kristen, namun terutama berbicara mengenai hubungan antara pemerintah, Allah dan orang-orang Kristen. Ada kaitan yang erat antara ketundukan (baca: rasa hormat) orang-orang Kristen terhadap pemerintah dan kettaatan pemerintah kepada Tuhan. Ketetaan orang-orang Kristen dalam Roma 13:1-7 tidak dibicarakan dalam kaitannya dengan pemerintah yang jahat, namun dalam kaitannya dengan pemerintah yang menjadi "hamba Allah."

1. Apakah kaitan antara "ketetaatan pada pemerintah" dan membayar pajak.

James S. Jeffers menjelaskan bahwa ada dua macam pembagian wilayah dalam kekasiran Roma; sebagian wilayah misalnya Siria, Mesir dan Yudea diperintah langsung oleh Kaisar Roma melalui para gubernur yang ditunjuk kaisar; sebagian wilayah yang lain termasuk kota Roma dikelola

oleh senat Roma.¹⁰¹ Kas negara digunakan untuk keperluan *public services*—yang salah satunya adalah untuk membayar para prajurit yang bertugas untuk menjaga keamanan—dari kota Roma dan provinsi-provinsi di bawah kekuasaan pemerintah Roma, sedangkan pengelolaan wilayah-wilayah yang berada di bawah kaisar diambil dari pertendaharaan kekayaan kaisar. Untuk memenuhi semua kebutuhan pengelolaan wilayah tersebut, pemerintah dan kaisar memungut pajak baik dari warga Roma maupun warga jajahan pemerintah Roma.¹⁰² Ada beberapa jenis pajak yang diberlakukan di era tersebut yakni *tributum soli* (pajak kepemilikan), *tributum capitatis* (pajak perorangan) dan beberapa jenis pajak lain yang terkait dengan perdagangan.¹⁰³

Dalam Roma 13:7 Paulus menggunakan dua istilah berbeda yakni *foron* “pajak” dan *telos* “cukai” untuk membicarakan uang yang harus diberikan orang-orang Kristen kepada pemerintah. Istilah *foron* dan *telos* yang Paulus gunakan pastilah menunjuk pada ketiga jenis pajak yang ada pada masa itu, yakni pajak kepemilikan, perorangan dan perdagangan. Paulus meminta jemaat Roma untuk membayar pajak dan cukai sebab hal itulah yang seharusnya dilakukan sebab pemerintah adalah “hamba Allah.”¹⁰⁴ Paulus sepertinya menyajarkan pemerintah seperti halnya kaum Lewi, mereka adalah sama-sama kelompok/ institusi yang menerima bagian persembahan karena pekerjaan mereka dalam melayani Tuhan.

¹⁰¹ James S. Jeffers, *The Greco-Romans World of the New Testament Era: Exploring Its Background of Early Christianity* (Illinois: IVP, 1999), 143.

¹⁰² Jeffers, *The Greco-Romans World*, 143.

¹⁰³ Pajak perorangan diberlakukan untuk laki-laki yang berusia 14 - 65 tahun dan untuk perempuan yang berusia 12-65 tahun. Penerapan pajak perorangan ini tidak selama sama dalam setiap provinsi di bawah Roma, di beberapa provinsi yang diharuskan membayar pajak hanyalah laki-laki, namun di beberapa provinsi yang lain, wanita pun diharuskan membayar pajak. Jeffers, *The Greco-Romans World*, 143-144; bdk. T. E. Schmidt, “Taxes” in *Dictionary of Jesus and the Gospel*, eds. Joel B. Green, Scot McKnight and I. Howard Marshall (Illinois: IVP, 1992), 804-805.

¹⁰⁴ Morris, *The Epistle to the Romans*, 466-467.

Selain menyebut mengenai pajak dan cukai, Paulus juga menasihatkan supaya jemaat Roma memberikan *fobos* “takut” dan *timei* “hormat” kepada orang yang berhak menerimanya. Menurut Cranfield, istilah *fobos* biasanya digunakan dalam konteks Allah; dalam Roma 13:3 memang istilah *fobos* digunakan untuk pemerintah, namun motivasi dari tindakan ini sendiri karena adanya otoritas Allah dibalik pemerintah; itulah sebabnya bagi Cranfield istilah *fobos* yang Paulus gunakan menuju pada Allah.¹⁰⁵ Berbeda dengan istilah *fobos*, istilah *timei* memiliki tingkat kualitas perbuatan yang lebih rendah dibandingkan istilah *fobos*; Paulus melakukan ini supaya jemaat Roma dapat membedakan antara rasa takut yang harus diberikan kepada Allah dan rasa hormat bagi raja/kaisar (pemerintah).¹⁰⁶

Menurut penulis, pandangan dari Cranfield kurang kuat, penggunaan istilah “takut” dan “hormat” dalam ay. 7 merupakan pararel dari istilah “pajak” dan “cukai.” Paulus menggunakan memergunakan istilah “takut” dan “hormat” untuk menegaskan bahwa yang harus diberikan kepada pemerintah bukan saja yang berbentuk materi (uang), namun haruslah juga dalam bentuk rasa “hormat” dan “takut.”

ANTARA PAULUS DAN PARA REFORMATOR

Dasar utama ketaatan umat Tuhan kepada pemerintah bagi Paulus adalah karena adanya otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka. Melawan otoritas pemerintah berarti melawan otoritas Tuhan juga. Di sisi yang lain, pemerintah sebagai penerima otoritas Tuhan, bukanlah pemangku otoritas tertinggi, ia adalah penerima otoritas yang harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberian otoritas itu kepadanya.

Pengalaman Paulus saat ia melihat kontribusi dari negara/pemerintah, pastilah memengaruhi penilaian Paulus terhadap lembaga ini. Meskipun demikian, Paulus pastilah tidak buta dalam melihat realitas pemerintah yang dapat melawan Tuhan, namun Paulus juga tidak buta dengan hal-hal positif dari

¹⁰⁵ Cranfield, *Romans*, 324-326.

¹⁰⁶ Cranfield, *Romans*, 324-326.

kehadiran pemerintah khususnya dalam menjaga keamanan bahkan menyediakan sarana (misalnya saja jalan yang menghubungkan antara kota wilayah-wilayah Roma) yang secara tidak langsung bermanfaat bagi pemberitaan Injil Paulus.

Jika kita membandingkan konteks pergumulan ajaran Paulus tentang negara dan konteks pergumulan dari para reformator, kita akan menemukan bahwa konteks pergumulan mereka jelas berbeda. Paulus tidak sedang berhadapan dengan sebuah pengalaman bagaimana gereja terjerat dalam hubungan politik dan kekuasaan dalam negara/pemerintahan. Paulus sedang berhadapan dengan persoalan pajak yang dapat berakibat pada persoalan serius yang lain--misalnya saja penganiayaan karena dianggap memberontak-- jika jemaat Roma melalaikan hal tersebut. Sedangkan kecenderungan dari para reformator untuk memisahkan gereja dan negara bersumber dari pengalaman mereka dalam melihat dampak negatif gereja yang secara aktif terlibat dalam politik dan kekuasaan negara/pemerintah. Para reformator sendiri tidak dapat disalahkan saat mereka mencoba untuk memisahkan gereja dan negara ataupun saat mereka meminta negara/pemerintah mendukung gereja sebab hal itulah yang menjadi pergumulan mereka dan situasi dan kondisi dari gereja-gereja reformasi memang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.

Jadi, kita harus mengingat bahwa Paulus tidak memiliki pergumulan yang sama dengan para reformator. Demikian juga dengan para reformator, mereka pun tidak memiliki pergumulan yang persis sama dengan pergumulan orang Kristen masa kini. Orang-orang Kristen masa kini pun memiliki pergumulan yang berbeda-beda sebab kondisi pemerintah di mana orang-orang Kristen tinggal adalah berbeda-beda. Tielman memberikan nasihat yang baik saat ia mengingatkan pembaca modern untuk berhati-hati sebab baik penulis Alkitab maupun penafsir memiliki konteksnya masing-masing.¹⁰⁷

IMPLIKASI, RELEVANSI DAN KESIMPULAN

Poin utama Roma 13:1-13 menurut Douglas J. Moo hanya satu, yakni "the need for Christians to 'submit' themselves to governmental authority."¹⁰⁸

¹⁰⁷ Tielman, *Paul & the Law*, 11.

¹⁰⁸ Moo, *Romans*, 420.

Pemerintah sebagai sebuah lembaga adalah milik Tuhan dan intrumen tangan Tuhan. Berbeda dengan Moo, menurut Elliot, Paulus tidak sedang membicarakan teologi mengenai pemerintah dalam Roma 13:1-7, dalam bagian tersebut Paulus sebenarnya sedang memberikan nasihat praktis untuk menghindarkan masalah serius bagi kekristenan di masyarakat berdasarkan pemahaman mengenai pemerintah yang idealis.¹⁰⁹ Walaupun dua kesimpulan ini tampaknya bertentangan, namun keduanya ada benarnya. Ajaran Paulus dalam surat Roma tidak sekedar menjawab pertanyaan tertentu secara pragmatis, namun Paulus memberikan dasar teologis untuk jawabannya, di sisi yang lain lagi jawaban Paulus dalam Roma 13:1-7 disampaikan dalam konteks tertentu yang tidak selalu sama dengan konteks pergumulan orang-orang Kristen di segala zaman dan tempat.

Bagaimanakah kita harus merespons saat pemerintah menjadi tidak takut akan Allah, tidak mengerjakan tanggung jawabnya bahkan menjadi lalim? R. C. Sproul memberikan masukan penting bagi kita dalam menilai isu etis ini, ia menulis "... the biblical concept of all earthly government is, in a sense, hierarchical. All human authority ... comes under the authority of God and of His Christ."¹¹⁰ Sproul kemudian menegaskan "... if the civil authority commands us to do something that God has forbidden, or forbids us from doing something that God has commanded, not only we may disobey, but we must disobey!"¹¹¹

Jika dalam sebuah pemerintahan terjadi penyelewengan, maka hal tersebut bukan karena lembaga pemerintahnya yang jahat namun orang-orang yang memerintahnya yang jahat. Jika orang-orang Kristen tidak mau melihat pemerintah melakukan hal-hal yang tidak baik, kita harus mau memengaruhi pemerintah kita dengan kebenaran Firman Tuhan. Kesadaran bahwa pemerintah adalah lembaga yang dibangun/dibentuk oleh Allah, seharusnya membuat orang-orang percaya tidak membiarkan lembaga ini dikelola dalam

¹⁰⁹ Elliot, *Liberating Paul*, 223-224.

¹¹⁰ R. C. Sproul, *Lifeviews: Make a Christian Impact on Culture and Society* (Grand Rapids: Baker, 1986), 202.

¹¹¹ Sproul, *Lifeviews*, 205.

ketidakbenaran; itulah sebabnya partisipasi orang-orang percaya dalam pemerintahan sangatlah diperlukan.¹¹²

Meskipun pengaruh dari nilai-nilai iman Kristen sangat dibutuhkan oleh negara dan pejabat negara, namun kita harus membatasi diri untuk tidak berupaya mendirikan negara “theokrasi.” Saat agama bersentuhan secara langsung dengan politik, maka agama dapat memerlakukan politik atau politik yang memerlakukan agama untuk kepentingannya. Di sisi yang lain, sebagaimana dijelaskan oleh H. Henry Meeter, tugas negara bukanlah untuk mengembangkan agama, negara memiliki domain tugas yang berbeda dari agama.¹¹³ Itulah sebabnya walaupun agama dan gereja tidaklah terpisahkan sebagai tangan-tangan Tuhan, namun negara dan gereja menang harus tetapi dibedakan.

Itulah sebabnya gereja hendaknya memengaruhi pemerintah tidak secara langsung dengan terjun dalam bidang politik atau partai politik. Ada tiga usulan yang baik dari Meeter mengenai bagaimana cara kita memengaruhi negara dan masyarakat dengan nilai-nilai iman Kristen yakni (i) “... dengan memaparkan dengan jelas prinsip-prinsip Firman Allah dalam penerapannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk bidang politik; (ii) “Para ilmuwan Kristen, perguruan tinggi Kristen, dan universitas-universitas Kristen harus mengembangkan prinsip-prinsip Alkitab dalam kaitannya dengan kehidupan sipil, di atas landasan Kristen,” (iii) “Pers Kristen, radio Kristen dan mimbang Kristen harus berusaha memengaruhi dan memikat hati public bagi kebenaran Firman Allah.”¹¹⁴

Apakah dengan demikian gereja tidak boleh berpolitik? Mark Hatfield memberikan beberapa evaluasi yang penting saat mendiskusikan mengenai bahaya dari gereja saat ia terlibat dalam politik praktis; pertama, beberapa orang dalam partai Kristen akan mulai menganggap partainya sebagai suara dan pemikiran alkitab, sehingga banyak hal akan menjadi “hitam putih” di-

¹¹² Bdk. Sproul, *Lifeworlds*, 208-209; Norman Geisler, “Orang Kristen dan Politik” in *Pola Hidup Kristen*, 924.

¹¹³ H. Henry Meeter, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*, terj. (Jakarta: Momentum, 2009), 179.

¹¹⁴ Meeter, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*, 182-183.

dampaknya adalah keperbedaan pandangan menjadi mati;¹¹⁵ Kedua, tujuan praktis dari kelompok-kelompok Kristen tertentu dapat menjadi lebih dominan dari pada ajaran Alkitab.¹¹⁶ Hatfield menasihatkan bahwa orang Kristen lebih baik terlibat dan berjuang secara politis dalam partai politik yang umum (tidak berbasiskan agama);¹¹⁷ Hal yang sama diperlihatkan oleh Geisler bahwa tidak ada partai politik yang memonopoli kebenaran.¹¹⁸ Apa yang dikatakan oleh Hatfield dan Geisler benar, ada perbedaan mendasar antara partai politik dan gereja, partai politik berorientasi pada perolehan suara dan kekuasaan, sedangkan gereja berorientasi pada ketakutan firman. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti orang-orang Kristen tidak boleh terlibat dalam politik sebagai seorang individu yang memiliki tanggung jawab baik untuk pekerjaan Tuhan maupun turut mengembangkan kesejahteraan kota atau masyarakat di mana Tuhan telah tempatkan kita.

Dalam Alkitab kita menemukan ada banyak contoh atau teladan dari orang-orang yang berjasa dalam pemerintahan atau negara. Yusuf merupakan seseorang yang dipakai Tuhan untuk memelihara baik keluarganya maupun bangsa Mesir saat kelaparan hebat terjadi di Timur Dekat Kuno. Demikian juga dengan Daniel, Alkitab memerlihatkan bahwa tokoh ini memengaruhi bahkan berjasa dalam pemerintahan di Babilonia. Jadi, keterlibatan individu umat Allah dalam pemerintahan tidaklah salah selama kehadiran mereka membawa dampak positif bagi negtinya.

CHANDRA GUNAWAN menyelesaikan pendidikan teologi dengan gelar Sarjana Teologi (S.Th.) dan Master of Divinity dari STTB Bandung, serta Magister Teologi dari STT Cipanas. Saat ini manjadi dosen tetap di STT SAPPI dan hamba Tuhan di GKIm Hosana, Bandung.

¹¹⁵ Martin Marty menjelaskan dengan sangat baik bahwa persoalan politik sering kali tidak bisa dinilai dengan “hitam atau putih,” itulah sebabnya perbedaan pandangan orang Kristen dalam politik seharusnya dapat memerkaya cara pandang mereka terhadap persoalan-persoalan politik tertentu. “Menghubungkan Iman dan Politik,” *Pola Hidup Kristen*, 925.

¹¹⁶ Hatfield, “Politik dan Kekristenan,” 920-921.

¹¹⁷ Hatfield, “Politik dan Kekristenan,” 921.

¹¹⁸ Norman Geisler, “Orang Kristen dan Politik,” 923.